



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN 2021 - 2026



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-PD
Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD
Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII Penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

- b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

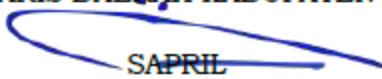
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan

32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini disusun sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 tahun.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat indikatif dan memuat program pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **“Mewujudkan Tanjung Jabung Timur Merakyat”**.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026 masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya dokumen perencanaan ini.

Muara Sabak, 31 Maret 2022


Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740408 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	46
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII PENUTUP	73
LAMPIRAN- LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan Pegawai	17
Tabel 2	Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur	17
Tabel 3	Pejabat Eselon Korwil Pendidikan Kecamatan	18
Tabel 4	Perkembangan Lembaga Satuan Pendidikan (Sekolah)	18
Tabel 5	Perkembangan Jumlah Siswa	19
Tabel 6	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perkembangan Dana BOS (Pusat) SD dan SMP	19
Tabel 7	Perkembangan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Perkembangan Kelulusan)	19
Tabel 8	Perkembangan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan (APK dan APM) Perluasan dan Pemerataan Akses	20
Tabel 9	Perkembangan Jumlah Guru menurut Status Pegawai	20
Tabel 10	Jumlah Guru dan Rombel/Ruang Kelas	21
Tabel 11	Jumlah dan Sebaran Guru SD Berdasarkan Guru Kelas dan Mata Pelajaran	21
Tabel 12	Jumlah dan Sebaran Guru SMP Berdasarkan Mata Pelajaran	21
Tabel 13	Jumlah dan Sebaran Guru SMA dan SMK Berdasarkan Mata Pelajaran	22
Tabel 14	Guru Bersertifikasi	22
Tabel 15	Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Ijazah pada Tahun 2020	23
Tabel 16	Perkembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	23
Tabel 17	Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Kursus)	23
Tabel 18	Perkembangan Sanggar Belajar (SKB)	24
Tabel 19	Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket A	24
Tabel 20	Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket B	24
Tabel 21	Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket C	24
Tabel 22	Perkembangan Kelompok Bermain	25
Tabel 23	Perkembangan TPA	25
Tabel 24	Perkembangan Anggaran Pendidikan	25
Tabel II	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024	40
Tabel III	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026	42
Tabel IV	Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Daerah dan OPD	51
Tabel V	Strategi dan Arah Kebijakan	56
Tabel VI	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	60
Tabel VII	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan	10
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16
Gambar 3.	Pembangunan Ruang UKS SD	26
Gambar 4.	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	26
Gambar 5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	26
Gambar 6.	Rehab Ruang Kelas SD	27
Gambar 7.	Pengadaan Meubelair SD	27
Gambar 8.	Pembangunan Ruang UKS SMP	28
Gambat 9.	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	28
Gambar10.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	28
Gambar 11.	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	29
Gambar 12.	Pengadaan Meubelair SMP	29
Gambar 13.	Rehab Rumah Dinas SMP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Ketentuan setiap Perangkat Daerah harus membuat Renstra tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Selain Inpres tersebut diatas, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dalam rangka membangun pendidikan yang lebih berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku penanggung jawab utama teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

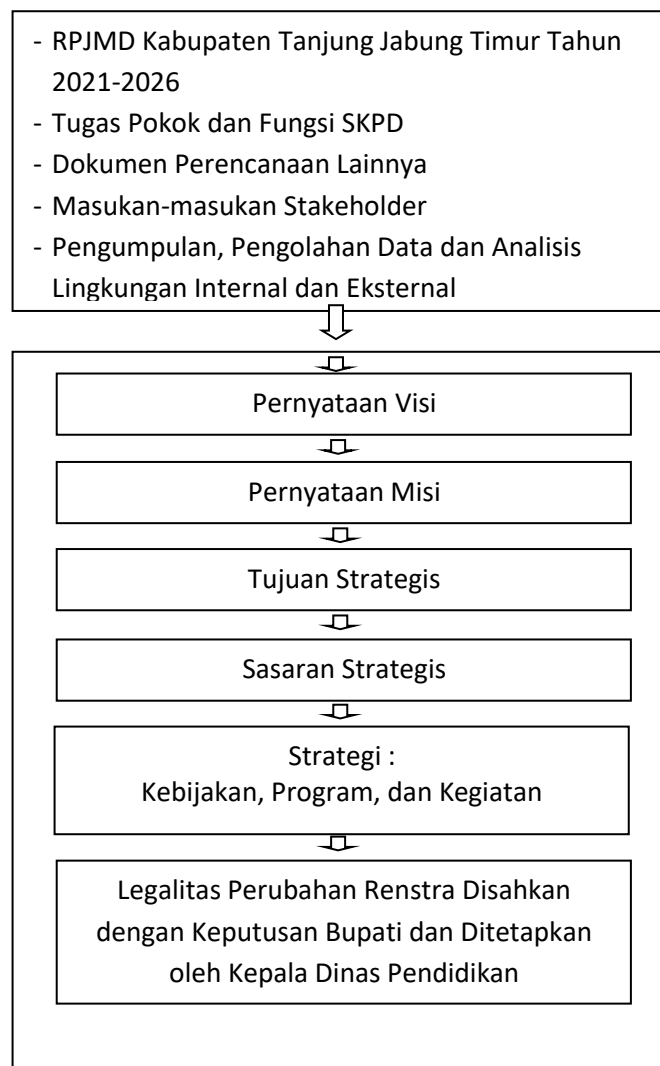
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Alur fikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disajikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas :

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan;
2. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;
4. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pendidikan;
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas :

Memberikan Pelayanan Teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran;
2. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
3. Pengelolaan Urusan Keuangan;

4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan; dan
6. Pengelolaan Urusan Umum.

3. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat.

4. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;

3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan Penetapan dan Penilaian Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian, Penataan, serta Penutupan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Tugas :

Melaksanakan Penyiapan Koordinasi, Fasilitasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Fungsi :

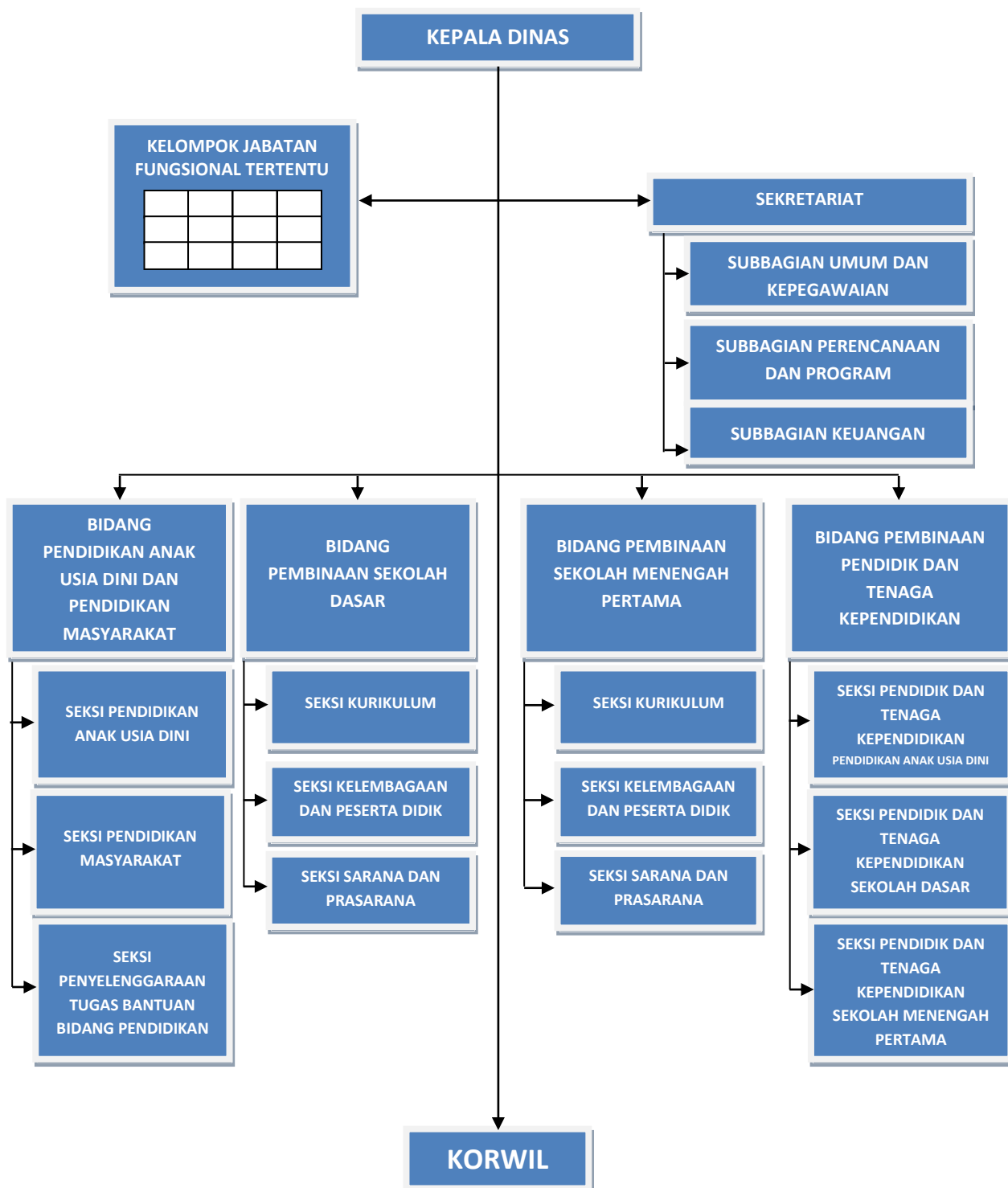
1. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bag, 12 (dua belas) Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas
b.	Sekretariat :
	1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Sub Bagian Program
	3. Sub Bagian Keuangan
c.	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :
	1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
	2. Seksi Pendidikan Masyarakat
	3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Bantuan Bidang Pendidikan
d.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar :
	1. Seksi Kurikulum
	2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
	3. Seksi Sarana dan Prasarana
e.	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama :
	1. Seksi Kurikulum
	2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
	3. Seksi Sarana dan Prasarana
f.	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
	1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
	2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
	3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
g.	Koordinator Wilayah Kecamatan(KORWIL)
h.	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Gambar. 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum Pegawai

Berikut tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1
Keadaan Pegawai

NO	STATUS	JUMLAH	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN				GOLONGAN			
			L	P	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	I	II	III	IV
1	PNS	42	29	13	-	19	1	18	4	-	16	19	6
2	NON PNS	43	22	21	1	18	1	23	-	-	-	-	-
JUMLAH		85	51	34	1	37	2	41	4	-	16	19	6

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 2
Pejabat Eselon
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	ESELON	JUMLAH
1	II-b	1
2	III-a	1
3	III-b	4
4	IV-a	12
5	IV-b	-
6	V-a	-
JUMLAH		21

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 3
Pejabat Eselon
KORWIL Pendidikan Kecamatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	IV-a	11
2	IV-b	7
3	V-a	-
4	V-b	-
JUMLAH		18

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

B. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan

Tabel 4
Perkembangan Lembaga Satuan Pendidikan (Sekolah)

No	Jenjang	Status	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	TK	Negeri	17	17	17	17
		Swasta	26	26	27	27
		Jumlah	43	43	44	44
2	SD	Negeri	204	204	204	204
		Swasta	2	2	2	2
		Jumlah	206	206	206	206
3	SMP	Negeri	45	45	45	45
		Swasta	0	0	0	0
		Jumlah	45	45	45	45
4	SMA	Negeri	10	10	10	10
		Swasta	2	2	2	2
		Jumlah	12	12	12	12
5	SMK	Negeri	6	6	6	6
		Swasta	1	1	1	1
		Jumlah	7	7	7	7

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Siswa

NO	JENJANG SEKOLAH	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/PAUD	766	2.074	1.102	998	1.022
2	SD	25.860	12.886	24.713	24.389	23.852
3	SMP	6.880	6.885	7.113	7.214	6.733
4	SMA		3.805	3.843	3.876	4.125
5	SMK	894	1.893	1.243	1.361	1.555
JUMLAH						

Tabel 6 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PERKEMBANGAN DANA BOS (PUSAT) SD DAN SMP							
NO	JENJANG	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	0	0	2.046.400.000	20.661.600.000	20.521.016.622	21.008.700.000
2	SMP	0	0	7.518.000.000	7.617.000.000	7.617.000.000	7.867.200.000
JUMLAH		0	0	9.564.400.000	28.278.600.000	28.138.016.622	28.875.900.000

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 7

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN						
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR						
(PERKEMBANGAN KELULUSAN)						
NO	INDIKATOR POKOK	2016	2017	2018	2019	2020
1	TINGKAT KELULUSAN SD	97,47%	100,36%	100,33%	100,31%	99,60%
2	TINGKAT KELULUSAN SMP	103,02%	101,97%	102,95%	100,88%	102,91%

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 8
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN
(APK DAN APM)

PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES

No	Indikator Kunci Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	APK SD/MI/SDLB/Paket A	99,99%	100,07%	98,96%	87,86%	93,36%
2	APM SDM/MI/SDLB/Paket A	100,01%	100,93%	100,41%	98,00%	100,05%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	109,79%	107,29%	106,66%	96,23%	103,16%
4	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	100,00%	94,24%	100,07%	95,80%	100,98%
APK = Angka Partisipasi Kasar APM = Angka Partisipasi Murni						

Sumber : LKPJ 2020

Tabel 9

Perkembangan Jumlah Guru Menurut Status Pegawai							
No	JENJANG SEKOLAH	STATUS	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	PNS					
		NON PNS					
JUMLAH							
2	TK	PNS	14	27	25	16	21
		NON PNS	67	107	113	90	105
JUMLAH			81	134	138	106	126
3	SD	PNS	1	13.344	1.310	1.283	1.306
		NON PNS	583	570	492	461	443
JUMLAH			584	13.914	1.802	1.744	1.749
4	SMP	PNS	437	450	432	430	414
		NON PNS	165	170	151	145	118
JUMLAH			602	620	583	575	532
5	SMA	PNS	194	202	203	204	215
		NON PNS	106	103	85	87	84
JUMLAH			300	305	288	291	299
6	SMK	PNS	63	84	92	93	102
		NON PNS	44	63	59	54	61
JUMLAH			107	147	151	147	163
JUMLAH GURU PNS			3.074	15.120	2.962	2.863	2.869

Tabel 10

JUMLAH GURU DAN ROMBEL / RUANG KELAS				
No	TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	JUMLAH KELAS	KEKURANGAN
1	GURU KELAS SD	1040	1445	-405
2	GURU AGAMA SD	156	156	0
3	GURU PENJASKES SD	82	2	80
4	GURU B. INGGRIS SD	6	6	0
5	GURU MP SMP	466	290	176
6	GURU MP SMA/SMK	309	56	253
<u>CATATAN SD</u>				
1. SEBARAN GURU BELUM MERATA				
2. JUMLAH MURID DENGAN RUANG ADA YANG LEBIH ADA YANG KURANG				

Sumber : Data Pokok Pendidikan

Tabel 11

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SD BERDASARKAN GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	GURU KELAS	1.372	908	464	0
2	AGAMA ISLAM	123	223	-100	0
3	BAHASA INGGRIS	0	0	0	0
4	PENDIDIKAN JASMANI	206	71	135	0
JUMLAH		1.701	1.202	499	0
<u>CATATAN</u>					
PERSEBARAN GURU KELAS DAN MATA PELAJARAN BELUM MERATA					

Tabel 12

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMP BERDASARKAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	24	35	0	11
2	AGAMA ISLAM	24	37	0	13
3	BAHASA INDONESIA	48	53	0	5
4	BAHASA INGGRIS	48	64	0	16
5	PENDIDIKAN JASMANI	24	19	5	0
6	MATEMATIKA	48	58	0	10
7	IPA	48	86	0	38
8	IPS	48	52	0	4
9	KERTAKES	24	4	20	0
10	BP/BK	0	0	0	0
11	TIK	24	7	17	0
JUMLAH		360	415	42	97
CATATAN : PERSEBARAN GURU MATA PELAJARAN BELUM MERATA					

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 13

JUMLAH DAN SEBARAN GURU SMA DAN SMK BERDASARKAN MATA PELAJARAN					
NO	MATA PELAJARAN	BUTUH	ADA	KURANG	LEBIH
1	PPKN	11	8	3	0
2	AGAMA ISLAM	11	12	0	1
3	BAHASA INDONESIA	28	20	8	0
4	BAHASA INGGRIS	28	22	6	0
5	SEJARAH	24	21	3	0
6	PENDIDIKAN JASMANI	11	9	2	0
7	MATEMATIKA	17	21	0	4
8	FISIKA	11	12	0	1
10	BIOLOGI	11	19	0	8
11	KIMIA	11	23	0	12
12	EKONOMI	11	15	0	4
13	SOSIOLOGO	11	11	0	0
14	GEOGRAFI	6	13	0	7
15	SENI BUDAYA	11	2	9	0
16	TIK	11	4	7	0
17	TATA NEGARA	5	0	5	0
18	ANTROPOLOGI	5	0	5	0
19	SASTRA INDONESIA	12	0	12	0
20	NPL	12	0	12	0
21	BUDI DAYA PERIKANAN	7	3	4	0
22	AGRIBISNIS PERIKANAN	2	4	0	2
23	TATA BUSANA	9	4	5	0
24	TATA BOGA	5	2	3	0
25	KKPI	9	0	9	0
26	OTOMOTIP	2	3	0	1
27	TEKNIK MESIN KAPAL	2	2	0	0
28	PERTANIAN	9	4	5	0
29	PERTERNAKAN	9	1	8	0

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 14

GURU BERSERTIFIKASI							
NO	JENJANG	TAHUN SERTIFIKASI BERDASARKAN SK DIRJEN PMPTK					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PAUD/TK	2	2	3	5	5	7
2	SD	317	556	634	825	1064	1063
3	SMP	152	9	98	110	162	165
3	PENGAWAS	21	21	21	21	21	21
JUMLAH		492	588	756	961	1252	1256

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 15

JUMLAH GURU MENURUT KUALIFIKASI IJAZAH PADA TAHUN 2020						
No.	Tempat Tugas	Jumlah Menurut Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SPG	D2	S1/D4	S2/S3	
1	TK	1	3	21	1	25
2	SD	76	99	1.110	6	1.285
3	SMP	1	3	425	23	429

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 16
PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

NO	SARANA/PRASARANA	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
1	RUANG UKS SD	7	45	57	63	74	246
2	RUANG PERPUSTAKAAN SD	5	96	94	91	98	384
3	RKB SD	4	6	9	12	7	38
4	REHAB SD	19	15	26	27	10	97
5	MEUBELER SD	1.730	1.560	2.740	36	1.662	7.728
6	REHAB RUMAH DINAS	25	33	26	27	14	125
7	RUANG UKS SMP	-	22	13	12	17	64
8	RUANG PERPUSTAKAAN SMP	6	35	26	27	26	120
9	RKB SMP	3	-	3	-	-	6
10	LABORATORIUM SMP	-	38	40	36	43	157
11	MEUBELER SMP	1.535	480	1.280	8	642	3.945
12	REHAB RUMAH DINAS SMP	4	3	-	-	-	7
13	REHAB SMP / SMA DAN SMK	2	-	6	-	-	8
14	RKB SMA / SMK	-	3	1	-	-	4
15	MEUBELER SMA / SMK	435	13	1.000	-	1.800	3.248

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 17
Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Kursus)

NO	JUMLAH	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	10	10	17	21	29
2	TUTOR	10	23	24	3	47
3	WARGA BELAJAR	105	196	476	758	818

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 18
Perkembangan Sanggar Belajar (SKB)

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	1	1	1	1	1
2	TUTOR	6	17	19	33	44
3	WARGA BELAJAR	20	195	150	265	227

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 19
Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket A

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET A	15	4	2	6	7
2	TUTOR	30	8	4	12	14
3	WARGA BELAJAR	210	85	39	127	148

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 20
Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket B

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET B	39	22	10	15	22
2	TUTOR	234	132	60	90	132
3	WARGA BELAJAR	806	393	246	448	564

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan

Tabel 21
Perkembangan Kelompok Belajar (KB) Paket C

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAKET C	20	21	16	25	24
2	TUTOR	100	126	6	175	168
3	WARGA BELAJAR	546	574	465	759	886

Tabel 22
Perkembangan Kelompok Bermain

NO	KELOMPOK BELAJAR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	223	225	229		305
2	TUTOR	446	280	790		915
3	WARGA BELAJAR	8,036	17,659	6,801		8,326

Tabel 23
Perkembangan TPA

NO	TPA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	LEMBAGA	2	2	1	3	5
2	TUTOR	4	4	2	6	10
3	WARGA BELAJAR	22	25	12	33	12

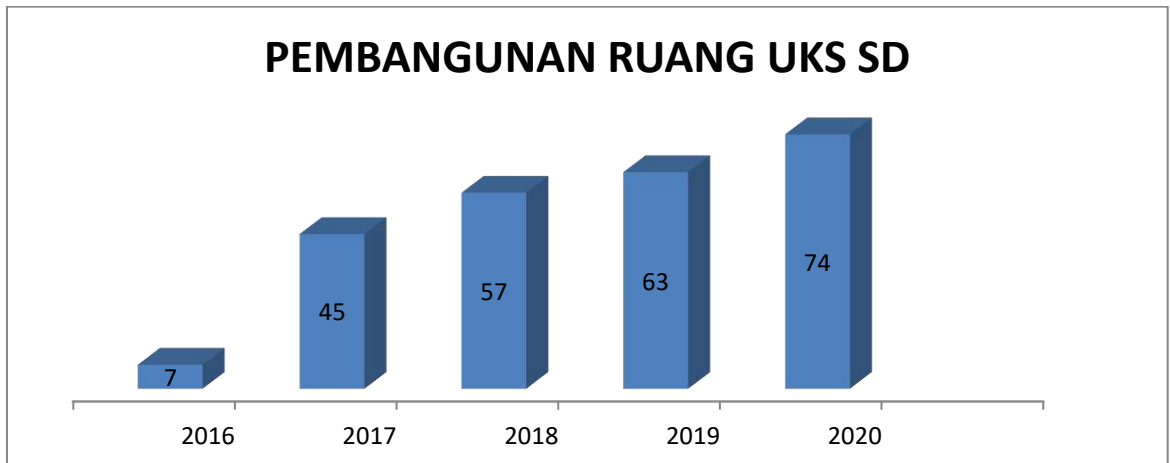
Tabel 24
Perkembangan Anggaran Pendidikan

2	2017	265.364.051.007,09
3	2018	296.652.048.261,00
4	2019	305.668.037.239,00
5	2020	292.734.897.056,00
6	2021	304.265.678.844,00

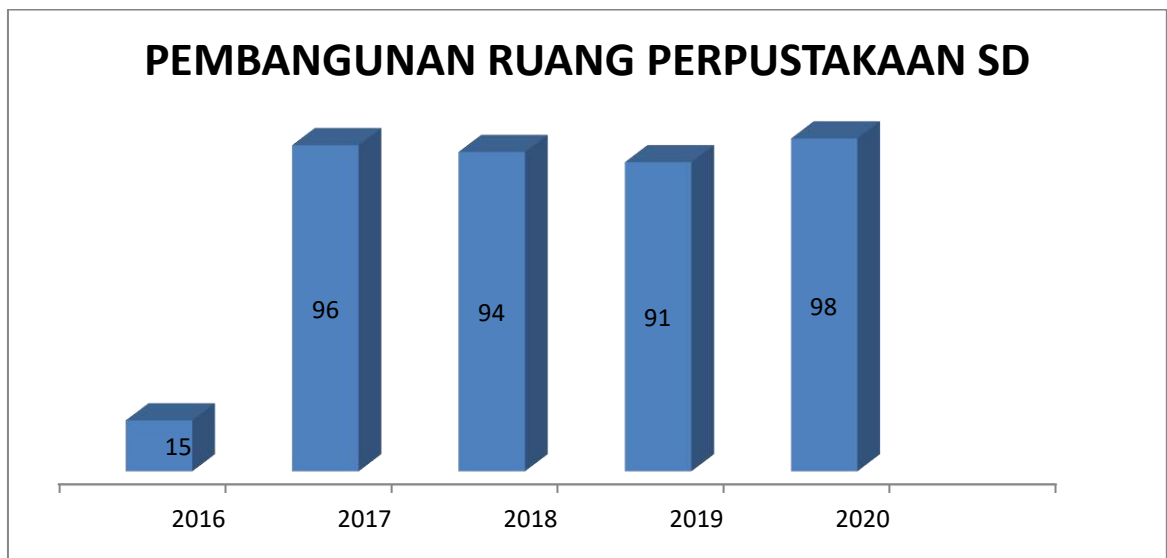
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah sebagai berikut :

Gambar. 3



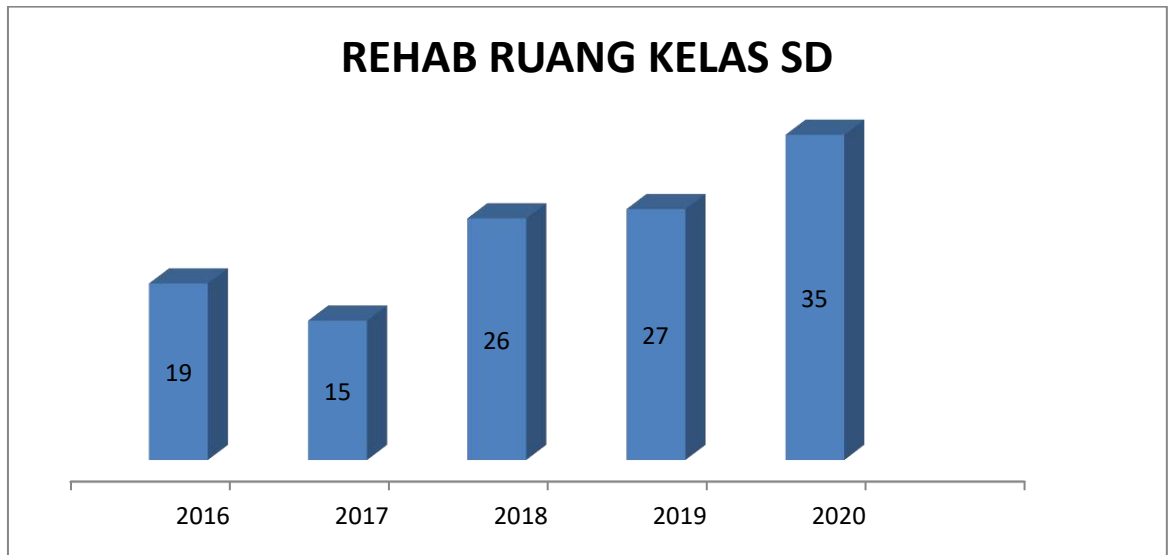
Gambar. 4



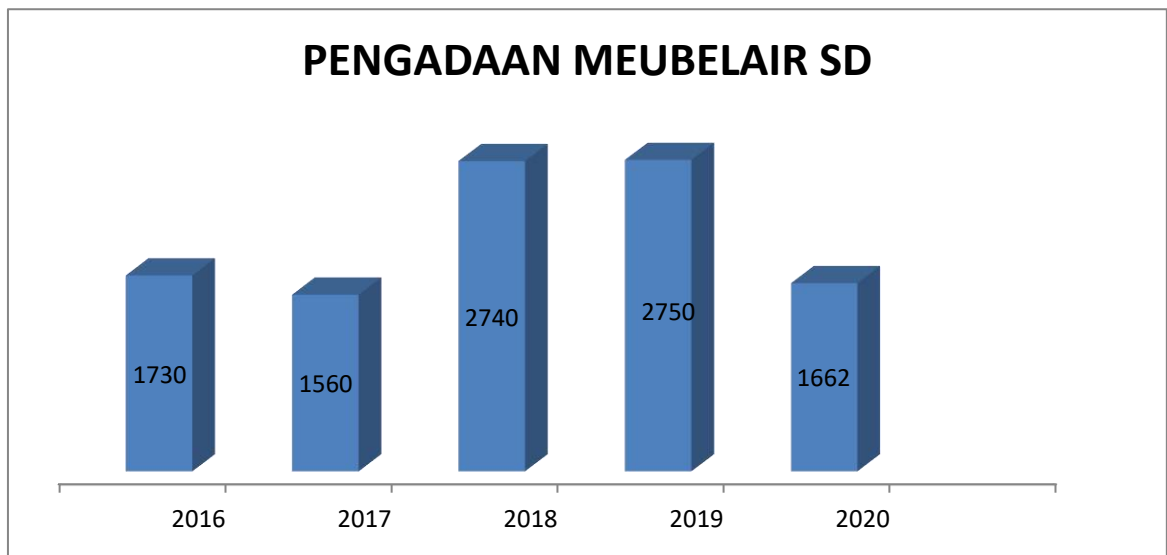
Gambar. 5



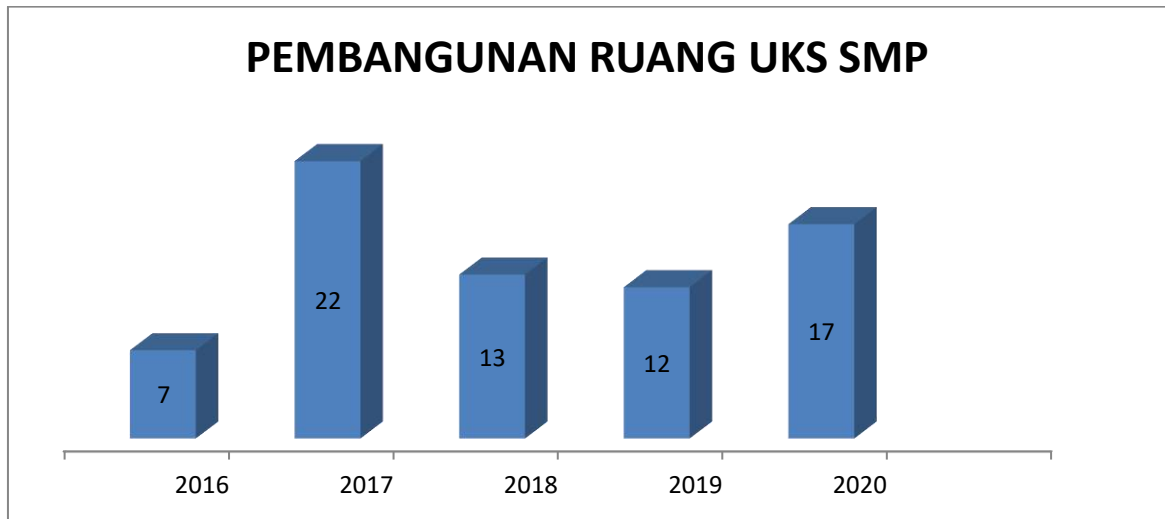
Gambar. 6



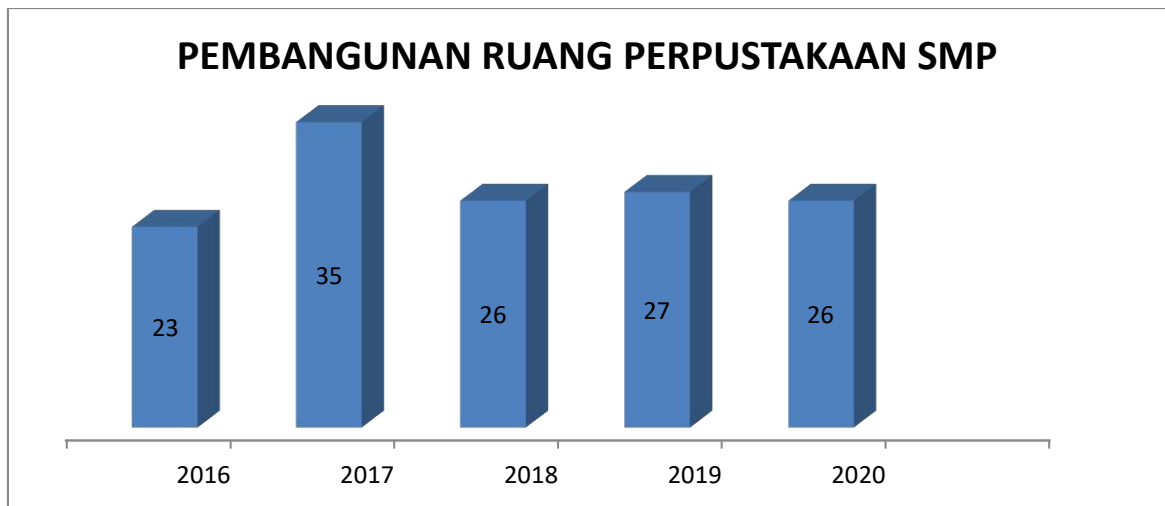
Gambar. 7



Gambar. 8



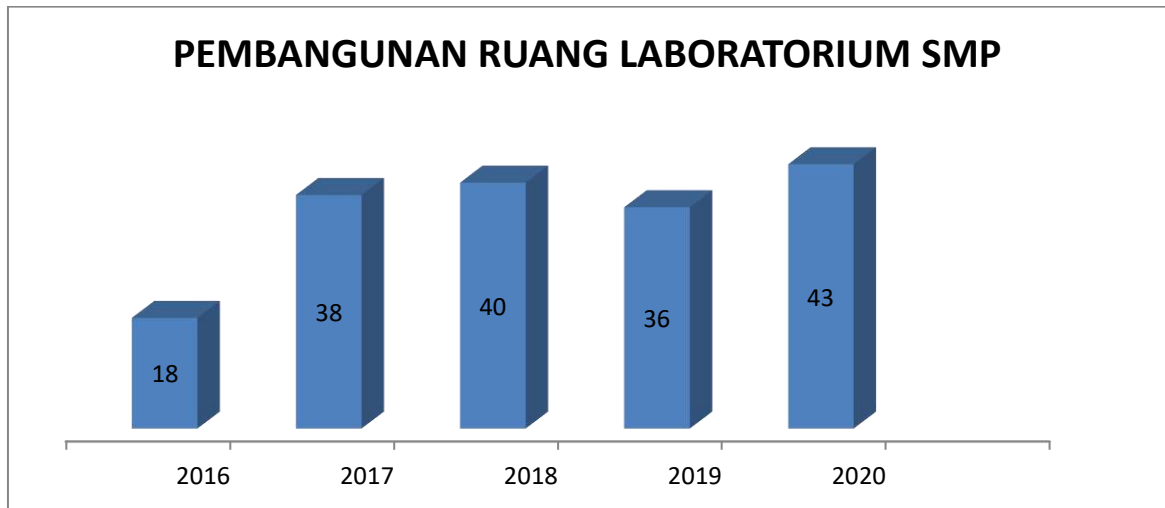
Gambar. 9



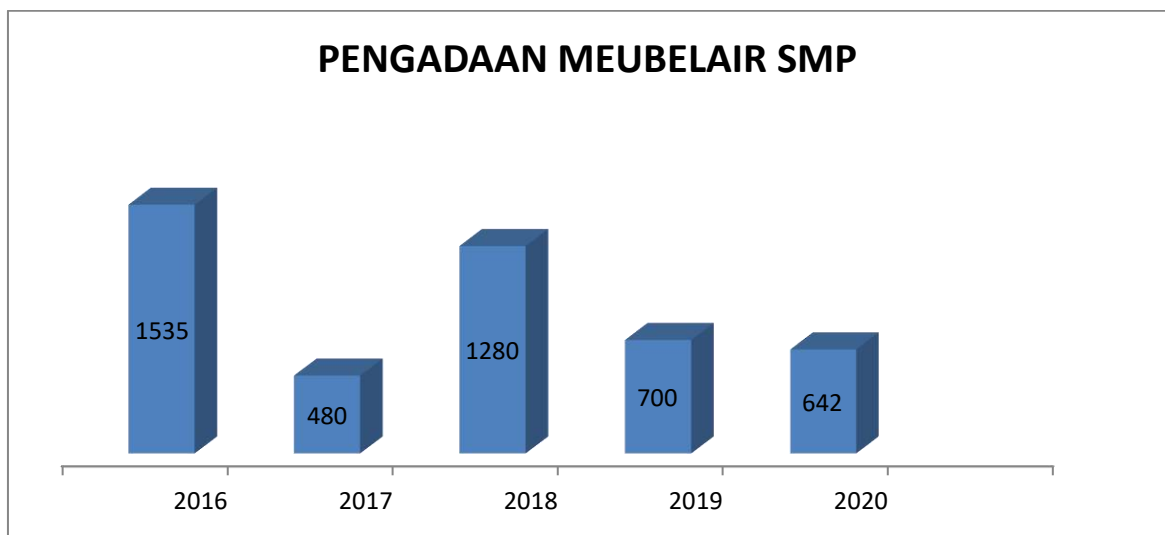
Gambar. 10



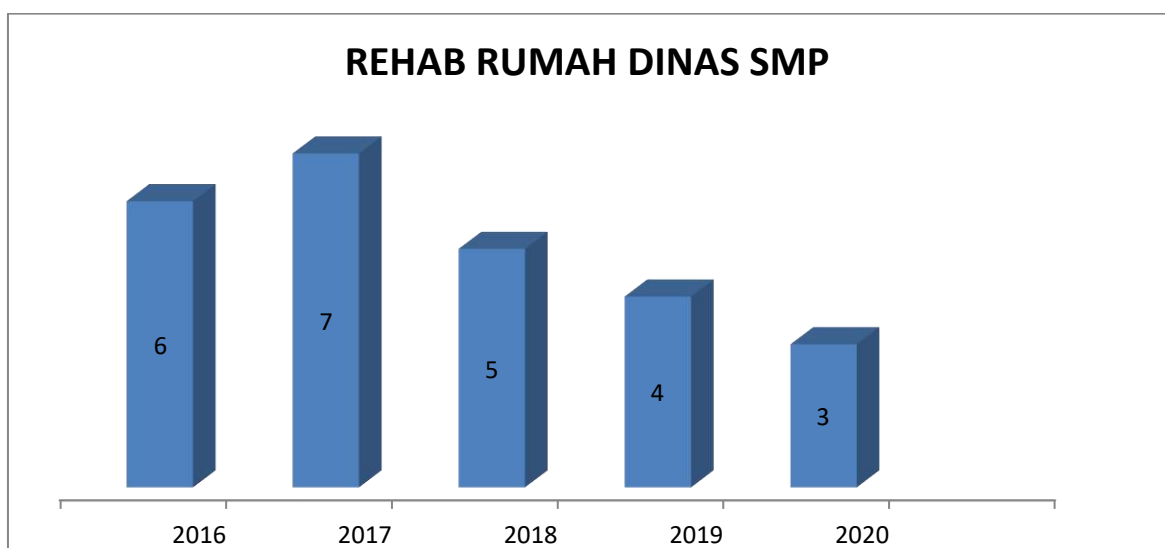
Gambar. 11



Gambar. 12



Gambar. 13



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas pokok dan fungsinya
- b. Adanya struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
- c. Terintegrasinya penyelenggaraan pembangunan dibidang pendidikan.
- d. Adanya lembaga-lembaga masyarakat yang mendukung tupoksi.
- e. Memiliki jumlah pegawai yang dibantu oleh tenaga honorer yang cukup memadai.
- f. Kesadaran tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- g. Kerjasama antar tenaga kependidikan baik.
- h. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.
- i. Kemampuan daya tampung peserta didik yang memadai.
- j. Kemampuan kinerja organisasi yang mantap.
- k. Penyebaran lembaga pendidikan merata.
- l. Memiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai.
- m. Memiliki pegawai yang berkinerja baik.
- n. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- o. Ruang kerja yang nyaman.
- p. Mudah terjangkau dan strategis.
- q. Mempunyai pegawai yang menguasai teknologi informasi lumayan cukup.
- r. Mempunyai system kerja yang baku.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Kualifikasi tenaga kependidikan masih ada yang tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu.
- b. Masih kurangnya tenaga perpustakaan dan laboran untuk SMP.
- c. Masih ada guru PAUD/TK yang berpendidikan SLTA sederajat.
- d. Masih ada guru SD yang berlatar belakang pendidikan D II dan D III.
- e. Masih kurangnya tenaga pengamanan (satpam), penjaga sekolah dan petugas kebersihan serta pelayanan sekolah.
- f. Pengetahuan dan keterampilan manajemen pendidikan belum maksimal.
- g. Sarana dan prasarana pendidikan belum terpenuhi.
- h. Unit pelaksanaan teknis pendidikan masih berdaya saing rendah.
- i. Penyelenggaraan pendidikan belum berjalan secara efisien dan efektif.
- j. Mutu pendidikan belum merata.
- k. Masih terdapat pegawai yang memiliki dedikasi rendah.
- l. Keterbatasan sumber dan tenaga pendataan serta pelaporan sehingga menghambat proses pembuatan rencana kerja dan laporan kinerja OPD.
- m. Sistem mekanisme kerja yang belum mantap.
- n. Sistem pembinaan SDM dan karir tenaga kependidikan belum terpenuhi secara merata.
- o. Masih terdapat pegawai yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya terhadap tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik.
- p. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik
- q. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh Program/kegiatan
- r. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan dibandingkan dengan tuntutan kualitas pelayanan prima
- s. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di daerah

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPORTUNITIES (O)

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.
- b. Dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabun Timur dalam bidang pendidikan cukup tinggi.
- c. Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintahan pusat.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan sangat tinggi.
- e. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- g. Adanya program kepala daerah terpilih yang memfokuskan peningkatan infrastruktur jalan, dan jembatan penunjang sektor pertanian, perkebunan, potensi agrowisata dan wisata bahari dan akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
- h. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
- i. Adanya bantuan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.
- j. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang baik.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- b. Tuntutan kualitas outcome semakin tinggi.
- c. Adanya tantangan globalisasi.
- d. Sistem pengelolaan dan pembinaan tenaga kependidikan belum mengacu pada prestasi.
- e. Terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri baik daerah maupun nasional, yang menyebabkan orang tua berasumsi bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin anaknya bisa bekerja secara layak sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya

- f. Semakin banyaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba)
- g. Meningkatnya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan.
- h. Meningkatnya angka kemiskinan.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambarkan di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;

- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Menjalin berbagai kerjasama dengan stakeholder pendidikan;
- e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Meningkatkan partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas dan kepala sekolah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- g. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), ada beberapa permasalahan yang belum tuntas diantaranya masih terdapat guru TK, SD dan SMP yang belum berkualifikasi pendidikan S1, masih terdapat guru TK, SD, SMP yang belum sertifikasi, masih ditemukan kekurangan Sarana prasarana belajar siswa, masih terdapat ruang kelas belajar yang rusak, persentase kelulusan siswa SD dan SMP belum mencapai 100%, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi, belum semua cabang olimpiade sains dapat bersaing secara nasional dan internasional, sebagian besar guru tidak berminat melakukan penelitian tindakan kelas, belum semua sekolah mampu melaksanakan proses belajar dan penilaian hasil belajar seperti yang dituangkan pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses, Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, belum semua guru pada sekolah mampu mengoperasikan Komputer, belum terpenuhi standar pembiayaan untuk penyelenggaraan / pengelolaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih ditemukan siswa mengulang, putus sekolah walaupun persentasenya kecil, dan masih terdapat guru yang tidak menguasai standar profesionalisme.

Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah,
2. Rendahnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar,
3. Belum Optimalnya Standar Mutu Pendidikan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah,
4. Rendahnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
5. Belum terwujudnya keadaan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan, dan
6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”**, adapun misinya adalah (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan; (2) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing (3) Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dari empat misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-dua yaitu *“Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing”* berupaya pada penyiapan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan gerbang peradaban dan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itu akan menargetkan : 1) menyiapkan tenaga pendidik yang cukup dan berkompeten; 2) menjamin fasilitas belajar dan mengajar yang layak dan nyaman, 3) meningkatkan aksesibilitas yang layak.

Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dalam upaya Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar antara melalui : (1) Meningkatkan sarana pendidikan dasar dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar; (2) Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang yang unggul dan berdaya saing berbasis pada pendidikan yang berkualitas.

Dari satu tujuan di atas, adalah yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar dan beberapa sasaran strategi yaitu: (a) Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah (b) Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (c) Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan perbaikan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, rumah dinas, sanitasi sekolah pendidikan dasar; dan (d) Mencetak Santri penghawal Al-Qur'an

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada peraturan menteri perencanaan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Dalam sosialisasi rancangan tersebut, secara umum sasaran RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Keberlanjutan pembangunan;
4. Peningkatan daya saing;
5. Inovasi teknologi;
6. SDM berkualitas;
7. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan yaitu SDM berkualitas.

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
3. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
8. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2020-2024, dari 8 (delapan) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor

pendidikan, yaitu **sinergi SDM, IPTEK dengan industri**, yang belum dapat informasikan secara terperinci.

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

(1.) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat; (2.) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis; (3.) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif; (4.) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan; (5.) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah; (6.) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Dari Enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi ke-dua. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan.

Dari tujuan di atas yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan dengan sasaran yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah.*

Untuk Mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam bidang pendidikan, penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Untuk melihat sinergitas kebijakan pendidikan antara Pusat, Provinsi dan Daerah diuraikan telaah terhadap renstra Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.4.1 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden yaitu untuk ***“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”***. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.

2. Penguatan Mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan system tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel II. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60
Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51,00
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69,0	71,8	74,6	77,4	80,0
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,5	31	40
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

Sumber : Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (halaman 67)

2.4.2 Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026, telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, telaah RTRW, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yakni “Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia“, maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu “Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas “ dengan Sasaran “Peningkatan Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut dapat ditabulasikan indikator-indikator sebagai alat ukur terhadap capaian pembangunan pendidikan dalam jangka menengah sebagai berikut :

Tabel III. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas	Peningkatan Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA dan SMK	74,23%	76,17%	78,12%	80,07%	82,02%
			Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	30%	35%	40%	45%	50%
			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	59,2%	60,02%	61,2%	62,2%	63,2%
			Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	28,3%	29,2%	30,1%	31%	31,9%
			Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	35%	40%	45%	50%	55%
			Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	27%	29%	31%	33%	35%
			Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	1%	2%	3%	4%	5%
			Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Pendidik Bahasa Indonesia	5%	10%	15%	20%	25%
			Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26,86%	27,86%	28,86%	29,86%	30,86%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
2			Persentase Sekolah Menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelolah oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan Dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	82	83	83
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70	71	71	72	72

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (halaman 54)

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan”***.

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi ; (a) Sistem Pusat Kegiatan; (b) Sistem Jaringan Prasarana Utama; (c) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; (f) rencana jaringan sumber daya air; dan (g) rencana jaringan prasarana wilayah lainnya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, pada permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah,
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan,
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia,
4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan
5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah

Permasalahan aktual Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan adalah sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 2) Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sektor pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat *multiplayer effect* pertumbuhan ekonomi;
- 4) Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
- 5) Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 7) Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk membangun sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;

- 8) Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- 9) Terjadinya kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar;
- 10) Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan Pembangunan Daerah pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan, diantaranya ;

1. Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan belum optimal;
2. Mutu pendidikan yang masih rendah;
3. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun belum dapat terwujud;
4. Ketersediaan dan penempatan guru yang belum merata;
5. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah ;
2. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan perbaikan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, rumah dinas, sanitasi sekolah pendidikan dasar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah. Visi dan Misi Bupati terpilih Periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Visinya yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”**, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang berkaitan dengan pendidikan terdapat pada Misi kedua Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Dan sebagai faktor penunjang dan pendukung terlaksananya layanan pendidikan terdapat pada misi keempat Bupati sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATK PelayanAN Publik
DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMINIS**

Dengan penetapan rumusan misi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan pendidikan dengan menyiapkan layanan pendidikan yang berkualitas dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing, selain itu juga mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, dan mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pendidikan merupakan gerbang peradaban dan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang akan menargetkan : 1) menyiapkan tenaga pendidik yang cukup dan berkompeten; 2) menjamin fasilitas belajar dan mengajar yang layak dan nyaman, 3) meningkatkan aksesibilitas yang layak. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan yang berkualitas antara lain adalah : (1). Terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh

pelosok Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (2). Terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (3). Terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri; (4) terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; (5) terselenggaranya layanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat.

Visi dan misi tersebut dijabarkan selanjutnya dalam Agenda pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka upaya dan prioritas bagaimana peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan akuntabilitas.

Dalam misi kedua dan keempat Bupati Tanjung Jabung Timur ini, terkandung makna bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab Meningkatkan Sistem Informasi Pendidikan dan Kerjasama Kelembagaan dengan melaksanakan pendataan bagi siswa, guru, sarana dan prasarana pendidikan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi, misi dan sasaran bupati yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi sasaran yang tertuang dalam RPJMD untuk merumuskan tujuan OPD. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain

adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan yang sudah dirumuskan OPD yang berpijak pada sasaran bupati. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (subgoals) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan management by objective atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang mengarah pada program pemerintahan pusat yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan dan program pemerintahan daerah yaitu mengarah pada pencapaian visi misi bupati yang sudah dirumuskan. Dinas Pendidikan menggunakan pola pusat ke daerah dan diteruskan kebawahan dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, yang tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disertai dengan indikator kinerjanya, sebagai berikut :

- I. Misi 1 (satu) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan indikator Laju Pertumbuhan

PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang memiliki 8 (delapan) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator,

II. Misi 2 (dua) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing, bertujuan sebagai berikut ;

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat indikator indeks kesehatan memiliki 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator,
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas indikator indeks pendidikan memiliki 1 (satu) sasaran yaitu Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata Lama Sekolah,
- 3) Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing indikator Rasio Kesempatan Kerja memiliki 1(satu) sasaran dan indikator,

III. Misi 3 (tiga) Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari, bertujuan sebagai berikut ;

- 1) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA memiliki 3 (tiga) sasaran dan Indikator,
- 2) Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja dengan indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja memiliki 2 (dua) sasaran dan Indikator,
- 3) Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH memiliki 2 (dua) sasaran dan Indikator.

IV. Misi 4 (empat) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis, bertujuan sebagai berikut ;

- 1) Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi memiliki 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator, dan
- 2) Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis dengan indikator Indeks rasa aman memiliki 2 (dua) sasaran dan indikator.

Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat pada misi kedua Bupati yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas” dengan sasaran Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar dan misi keempat Bupati yaitu “Membangun birokrasi yang tangguh,

terampil dan berintegritas”, dengan sasaran Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 meliputi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
2. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang menjadi tujuan bidang pendidikan diatas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 6 (enam) sasaran pokok pendidikan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar;
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
3. Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi;
4. Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional
5. Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. IV

Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Daerah dan OPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah		Angka BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76
		Harapan Lama Sekolah			Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t: Jumlah penduduk usia i pada tahun t t: Usia ($a, a+1, 2, \dots, n$) FK: Faktor koreksi pesantren	Tahun	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18
			1.1 Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	APS 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	63,91	100	100	100	100	100
				APS Kesetaraan 7 - 18 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan dengan Populasi penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berdasarkan proyeksi (BPS)	%	90,00	100	100	100	100	100
				APS 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	-	100	100	100	100	100
			1.2 Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56
				Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74
			1.3 Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	Jumlah lembaga yang berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	%	30,10	33,80	62,10	62,13	62,16	62,19
			1.4 Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yang memiliki ijazah S1/D4,S2,dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	%	44,73	45,09	63,00	64,00	65,00	66,00
			1.5 Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.	Nilai	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69
				Iklim Keamanan SMP		Nilai	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23
				Iklim Kebhinekaan SD	Iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Nilai	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73
				Iklim Kebhinekaan SMP		Nilai	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95
				Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69
				Iklim Inklusivitas SMP		Nilai	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja aparatur	Indeks Pelayanan Publik		Angka Menpan RB	Penilaian Menpan RB	Nilai	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
			2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	hasil survey	Nilai	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00
				Prediket Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan dan kebudayaan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini.

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama, yaitu: “Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar”, dicapai melalui **Strategi** “Peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan;
2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar;
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar; dan
4. Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.

Sasaran Kedua, yaitu: “Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar”, dicapai melalui **Strategi**

“Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah “Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)”.

Sasaran Ketiga, yaitu: “Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi”, dicapai melalui **Strategi** “Peningkatan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar.

Sasaran Keempat, yaitu: “Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional”, dicapai melalui **Strategi** “ pendidik dan tenaga kependidikan profesional”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
2. Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
3. Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru.

Sasaran Kelima, yaitu: “Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan”, dicapai melalui **Strategi** “ Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah untuk menciptakan iklim keamanan, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas;
2. Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

Sasaran Keenam, yaitu: “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”, dicapai melalui **Strategi** “ Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur”. **Arah kebijakan** strategi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima;
2. Menyiapkan Rencana Aksi Pencapaian target SPM;

3. Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja; dan
4. Meningkatkan Tindak lanjut Temuan.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Meningkatkan partisipasi pendidikan	Peningkatan partisipasi pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar	Pengelolaan Pendidikan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagipendidikan anak usia dini dan dasar	Pengelolaan Pendidikan
			Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Melakukan kegiatan OSN,O2SN, FLS2N, LPI, LCC, OPSI, LKS, APEKSI, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing	Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Penerapan Pendidikan berdasarkan Implemen Kurikulum Merdeka (IKM)	Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Peningkatan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Melaksanakan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
			Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
	Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah : ➢ Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan ➢ Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan ➢ Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan	Pengelolaan Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	
			Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas,.	Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas.	Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas.	Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas.	Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas.	Melaksanakan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi serta disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, diantaranya; ➢ Iklim Keamanan, ➢ Iklim Kebinekaan, ➢ Iklim Inklusivitas.	Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Pengelolaan Urusan Administratif
			Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Pengelolaan Urusan Administratif
			Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Pengelolaan Urusan Administratif
			Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Meningkatkan Tindak lanjut Temuan	Pengelolaan Urusan Administratif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: pertama Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel. VI
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	K O D E	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
MISI Ke : 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing : 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																				
Tujuan Strategis RPJMD : 2.2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing : 4.1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																				
Sasaran RPJMD : 2.2.1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar : 4.1.4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur																				
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1,01, 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	82,25	82,30	213.649.097	83	235.014.007	83,30	256.378.916	84	277.743.826	84,5	299.108.736	85	320.473.646	85	1.602.368.228	Sekretariat
				Nilai IKM	71,66	78		81		84		87		90		93				
				Predik特 AKIP	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB				
		1,01, 01,2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	173.767	100	191.144	100	208.520	100	225.897	100	243.274	100	260.651	100	1.303.253	Sub Bagian Perencana
		1,01, 01,2 01,0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	8 Dokumen	8	133.996	8	147.396								16	281.392	Sub Bagian Perencana	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					8	160.795	8	174.195	8	187.594	8	200.994	32		723.578
		1,01, 01,2 01,0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja	3 Dokumen	3	19.626	3	21.589								6	41.215	Sub Bagian Perencana	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan					3	23.551	3	25.514	3	27.476	3	29.439	12		105.980
		1,01, 01,2 01,0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1 Tahun	1	20.145	1	22.160								2	42.305	Sub Bagian Perencana	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					4	24.174	4	26.189	4	28.203	4	30.218	16		108.783
		1,01, 01,2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	212.283.831	100	233.512.214	100	254.740.597	100	275.968.980	100	297.197.363	100	318.425.747	100	1.592.128.733	Sub Bagian Keuangan
		1,01, 01,2 02,0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12	211.112.031	12	232.223.234								24	443.335.265	Sub Bagian Keuangan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan (Orang/bulan)					12	253.334.437	12	274.445.640	12	295.556.843	12	316.668.047	48	1.140.004.967	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1,01, 01,2 02,0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12	1.171.800	12	1.288.980									24	2.460.780	Sub Bagian Umum
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					1	1.406.160	1	1.523.340	1	1.640.520	1	1.757.700	4	6.327.720	
		1,01, 01,2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	62.500	100	68.750	100	75.000	100	81.250	100	87.500	100	93.750	100	468.750	Sub Bagian Umum
		1,01, 01,2 05,0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 Stel	85	42.500	85	46.750									170	89.250	Sub Bagian Umum
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket					1	51.000	1	55.250	1	59.500	1	63.750	4	229.500	
		1,01, 01,2 05,0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	8 Orang	8	20.000	8	22.000									16	42.000	Sub Bagian Umum
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang					8	24.000	8	26.000	8	28.000	8	30.000	32	108.000	
		1,01, 01,2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	233.186	100	256.505	100	279.823	100	303.142	100	326.460	100	349.779	100	1.748.895	Sub Bagian Umum
		1,01, 01,2 06,0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	47 Buah/Jenis	47	22.219	47	24.441									94	46.660	Sub Bagian Umum
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1	26.663	1	28.885	1	31.107	1	33.329	4	119.983	
		1,01, 01,2 06,0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1	65.799	1	72.379									2	138.178	Sub Bagian Umum
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1	78.959	1	85.539	1	92.119	1	98.699	4	355.315	
		1,01, 01,2 06,0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	2 Jenis	2	14.728	2	16.201									4	30.929	Sub Bagian Umum
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket					1	17.674	1	19.146	1	20.619	1	22.092	4	79.531	
		1,01, 01,2 06,0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12	5.000	12	5.500									24	10.500	Sub Bagian Umum
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					1	6.000	1	6.500	1	7.000	1	7.500	4	27.000	
		1,01, 01,2 06,0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyedian makan minum tamu	12 Bulan	12	45.000	12	49.500									24	94.500	Sub Bagian Umum
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan					1	54.000	1	58.500	1	63.000	1	67.500	4	243.000	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penangung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1,01, 01,2 06,0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12	80.440	12	88.484									24	168.924	Sub Bagian Umum
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					1	96.528	1	104.572	1	112.616	1	120.660	4	434.376	
		1,01, 01,2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	179.834	100	197.817	100	215.801	100	233.784	100	251.768	100	269.751	100	1.348.755	Sub Bagian Umum
		1,01, 01,2 07,0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12	179.834	12	197.817									24	377.651	Sub Bagian Umum
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit					12	215.801	12	233.784	12	251.768	12	269.751	48	971.104	
		1,01, 01,2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	112.050	100	123.255	100	134.460	100	145.665	100	156.870	100	168.075	100	840.375	Sub Bagian Umum
		1,01, 01,2 08,0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225 Buah	225	2.250	225	2.475									450	4.725	Sub Bagian Umum
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan					1	2.700	1	2.925	1	3.150	1	3.375	4	12.150	
		1,01, 01,2 08,0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	109.800	12	120.780									24	230.580	Sub Bagian Umum
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan					3	131.760	3	142.740	3	153.720	3	164.700	12	592.920			
		1,01, 01,2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	603.929	100	664.322	100	724.715	100	785.108	100	845.501	100	905.894	100	4.529.468	Sub Bagian Umum
		1,01, 01,2 09,0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	89 Unit	89	109.800	89	120.780									178	230.580	Sub Bagian Umum
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	88 Unit					88	131.760	88	142.740	88	153.720	88	164.700	352	592.920	
		1,01, 01,2 09,0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin dan Lainnya yang dipelihara (Mesin Kantor)	1 Tahun	1	6.860	1	7.546									2	14.406	Sub Bagian Umum
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit					1	8.232	1	8.918	1	9.604	1	10.290	4	37.044	
		1,01, 01,2 09,0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Gedung	2	487.269	2	535.996									4	1.023.265	Sub Bagian Umum
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit					2	584.723	2	633.450	2	682.177	2	730.904	8	2.631.253	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD												
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
Meningkat-nya Akses dan Mutu Pendidikan dasar		1,01, 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka rata-rata Lama Sekolah	6,70	6,71	130.531.940	6,72	147.531.759	6,73	135.794.209	6,74	147.190.264	6,75	158.586.319	6,76	169.982.375	6,76	889.616.866	BPS										
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,16	12,33		12,50		12,67		12,84		13,01		13,18		13,18		BPS										
	1. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar			APS PAUD 5-6 Tahun	63,91	63,91		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	Bidang PAUD dan DIKMAS			
				APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	90,00	90,00		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pembinaan SD, SMP		
				APS Kesetaraan 7 - 18 Tahun	-	-		100		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang PAUD dan DIKMAS		
	2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar			Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73	1,73		1,74		53,94		56,48		59,02		61,56		61,56		61,56	61,56	61,56	61,56	61,56	61,56	61,56	Bidang Pembinaan SD			
				Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73	1,73		1,74		63,12		66,14		69,16		72,18		72,18		72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	Bidang Pembinaan SMP		
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59	1,59		1,70		40,27		41,72		43,17		44,62		44,62		44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	Bidang Pembinaan SD		
				Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1,65	1,65		1,67		54,80		56,78		58,76		60,74		60,74		60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	60,74	Bidang Pembinaan SMP		
	3. Meningkatkan Standar Mutu Pendidikan dan Pelaksanaan Akreditasi				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10		30,10		33,80		62,10		62,13		62,16		62,19		62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	Bidang PAUD dan DIKMAS			
	4. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional			Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73	44,73		45,09		63,00		64,00		65,00		66,00		66,00		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	Bidang PTK		
				Keterangan : Indikator ini penilaiannya dari 2021 s/d 2022, sedangkan 2023 s/d 2026 indikator ini dihilangkan dalam IKU Perubahan Indikator (Lihat dilampiran terakhir hal 74)		Rasio Pengawas dan Penilik PAUD		3,01		3,04		3,08		3,12		3,14		3,14		3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	Bidang PTK		
	5. Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan				Iklim Keamanan SD	Nilai		-		-		85,07		88,61		92,15		95,69		95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	Bidang Pembinaan SD		
					Iklim Keamanan SMP	Nilai		-		-		80,21		83,55		86,89		90,23		90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	Bidang Pembinaan SMP	
					Iklim Kebhinekaan SD	Nilai		-		-		87,26		89,75		92,24		94,73		94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	94,73	Bidang Pembinaan SD
					Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai		-		-		77,33		79,53		81,74		83,95		83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	83,95	Bidang Pembinaan SMP
					Iklim Inklusivitas SD	Nilai		-		-		76,38		79,49		82,59		85,69		85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	85,69	Bidang Pembinaan SD
					Iklim Inklusivitas SMP	Nilai		-		-		76,36		79,46		82,56		85,66		85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66
		1,01, 02.2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	100	46.713.164	100	53.619.911	100	58.514.770	100	63.409.630	100	68.304.489	100	73.199.349	100	363.761.313	Bidang Pembinaan SD										
		1,01, 02.2 01.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan ruang kelas baru	1 Ruang	1	80.000	1	88.000									2	168.000	Bidang Pembinaan SD										
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang					1	96.000	1	104.000	1	112.000	1	120.000	4	432.000											
		1,01, 02.2 01.0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	4 Ruang	3	722.295	3	794.525									6	1.516.820	Bidang Pembinaan SD										
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang					3	866.754	3	938.984	3	1.011.213	3	1.083.443	12	3.900.393											
		1,01, 02.2 01.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang di Bangun	4 Ruang	4	1.299.922	4	1.429.914									8	2.729.836	Bidang Pembinaan SD										

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang					4	1.559.906	4	1.689.899	4	1.819.891	4	1.949.883	16	7.019.579			
		1.01.02.201.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	6 Ruang	6	1.339.668	6	1.473.635										12	2.813.303	Bidang Pembinaan SD	
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang					3	1.607.602	3	1.741.568	3	1.875.535	3	2.009.502	12	7.234.207			
		1.01.02.201.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	13 ruang	13	2.510.570	13	2.761.627										26	5.272.197	Bidang Pembinaan SD	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit					4	3.012.684	4	3.263.741	4	3.514.798	4	3.765.855	16	13.557.078			
		1.01.02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	37 ruang	37	7.384.352	37	8.122.787											74	15.507.139	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang					12	8.861.222	12	9.599.658	12	10.338.093	12	11.076.528	48	39.875.501			
		1.01.02.201.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala sekolah/TU yang direhab	6 ruang	6	1.097.083	3	1.206.791											9	2.303.874	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang					2	1.316.500	2	1.426.208	2	1.535.916	2	1.645.625	8	5.924.248			
		1.01.02.201.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab	3 ruang	3	849.345	3	934.280											6	1.783.625	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang					3	1.019.214	3	1.104.149	3	1.189.083	3	1.274.018	12	4.586.463			
		1.01.02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah yang di Rehab	4 Unit	4	59.100	4	65.010											8	124.110	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit					3	70.920	3	76.830	3	82.740	3	88.650	12	319.140			
		1.01.02.201.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas yang direhab (Paket)	3 Paket	3	374.000	3	411.400											6	785.400	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit					2	448.800	2	486.200	2	523.600	2	561.000	8	2.019.600			
		1.01.02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebel/ruas Sekolah	12 Paket	12	396.000	12	435.600											24	831.600	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket					12	475.200	12	514.800	12	554.400	12	594.000	48	2.138.400			
1.01.02.201.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket bahan/peralatan perlengkapan belajar siswa SD	75 paket	75	5.825.000	21	6.407.500											96	12.232.500			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11 Paket					11	6.990.000	11	7.572.500	11	8.155.000	11	8.737.500	44	31.455.000					

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.01, 02.2 01.2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	206 Satuan Pendidikan	206	213.006	206	234.307									412	447.313	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	200 Satuan Pendidikan					200	255.607	200	276.908	200	298.208	200	319.509	800	1.150.232	
		1.01, 02.2 01.2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terpantaunya Proses Belajar Mengajar Siswa	1 Tahun	1	68.220	1	75.042									2	143.262	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 Satuan Pendidikan					200	81.864	200	88.686	200	95.508	200	102.330	800	368.388	
		1.01, 02.2 01.2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Kegiatan	5	292.738	5	322.012									10	614.750	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	63 Peserta Didik					63	351.286	63	380.559	63	409.833	63	439.107	252	1.580.785	
		1.01, 02.2 01.2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	1	3.033.500	1	3.336.850									2	6.370.350	Sub Bidang PTK SD
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	497 Orang					497	3.640.200	497	3.943.550	497	4.246.900	497	4.550.250	1988	16.380.900	
		1.01, 02.2 01.2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksnaannya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	206 Sekolah	206	50.000	206	55.000									412	105.000	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	199 Satuan Pendidikan					199	60.000	199	65.000	199	70.000	199	75.000	796	270.000	
		1.01, 02.2 01.2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	206 Satuan Pendidikan	206	21.118.365	206	23.230.202									412	44.348.567	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	205 Satuan Pendidikan					205	25.342.038	205	27.453.875	205	29.565.711	205	31.677.548	820	114.039.171	
		1.01, 02.2 01.3 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laborotirim Sekolah Dasar yang telah dibangun	10 Ruang			10	2.235.430									10	2.235.430	Bidang Pembinaan SD
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	11 Ruang					11	2.458.973	11	2.682.517	11	2.906.060	11	3.129.603	44	11.177.152	
		1.01, 02.2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	100	70.892.288	100	79.928.711	100	62.024.653	100	67.254.200	100	72.483.747	100	77.713.294	100	430.296.894	Bidang Pembinaan SMP
		1.01, 02.2 02.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah penambahan ruang kelas baru	3 Ruang	3	310.000											3	310.000	Bidang Pembinaan SMP
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang			3	341.000	3	372.000	3	403.000	3	434.000	3	465.000	15	2.015.000	
		1.01, 02.2 02.0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	3 Ruang			3	657.042									3	657.042	Bidang Pembinaan SMP

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang					1	722.746	1	788.450	1	854.155	1	919.859	4	3.285.210		
		1.01, 02.2 02.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang di Bangun	2 Ruang			2	377607.003									2	377.607	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang					2	415.368	2	453.128	2	490.889	2	528.650	8	1.888.035		
		1.01, 02.2 02.0 6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang Dibangun	5 Ruang			5	2141311									5	2.141.311	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang					5	2.355.442	5	2.569.573	5	2.783.704	5	2.997.835	20	10.706.555		
		1.01, 02.2 02.1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	1 paket	1	100.000	1	110.000									2	210.000	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit					2	120.000	2	130.000	2	140.000	2	150.000	8	540.000		
		1.01, 02.2 02.1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Sekolah yang direhab	25 Paket	25	23.137.258	25	25.450.984										50	48.588.242	Bidang Pembinaan SMP
				Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit					25	27.764.710	25	30.078.435	25	32.392.161	25	34.705.887	100	124.941.193		
		1.01, 02.2 02.1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	51 Ruang	51	23.137.258	51	23.137.258									102	46.274.516		
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang					5	1.196.001	5	1.315.602	5	1.435.202	5	1.554.802	20	5.501.607		
		1.01, 02.2 02.1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang													0	-		
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang					1	180.100	1	198.110	1	216.120	1	234.130	4	828.460		
		1.01, 02.2 02.2 4	Rehabilitasi sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Paket	7	100.000	7	110.000									14	210.000	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit					2	120.000	2	130.000	2	140.000	2	150.000	8	540.000		
		1.01, 02.2 02.2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebel Sekolah	14 Paket	14	451.140	14	496.254										28	947.394	Bidang Pembinaan SMP
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket					5	541.368	5	586.482	5	631.596	5	676.710	20	2.436.156		
		1.01, 02.2 02.2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	36 Paket			36	1.320.960										36	1.320.960	
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	36 Paket					36	1.453.056	36	1.585.152	36	1.717.248	36	1.849.344	144	6.604.800		
		1.01, 02.2 02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49 Satuan Pendidikan	49	187.841	49	206.625										98	394.466	Bidang Pembinaan SMP

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	4500 Peserta Didik					4500	225.409	4500	244.193	4500	262.977	4500	281.762	18000	1.014.341		
		1,01, 02,2 02,3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Tahun	1	326.535	1	359.189									2	685.724	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	45 Satuan Pendidikan					45	391.842	45	424.496	45	457.149	45	489.803	180	1.763.289		
		1,01, 02,2 02,3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Kegiatan	5	389.483	5	428.431									10	817.914	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	42 Peserta Didik					42	467.380	42	506.328	42	545.276	42	584.225	168	2.103.208		
		1,01, 02,2 02,3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Tahun	1	2.747.850	1	3.022.635										2	5.770.485	Sub Bidang PTK SMP
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	287 Orang					287	3.297.420	287	3.572.205	287	3.846.990	287	4.121.775	1148	14.838.390		
		1,01, 02,2 02,4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1 Tahun	1	123.090	1	135.399										2	258.489	Bidang Pembinaan SMP
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	45 Satuan Pendidikan					45	147.708	45	160.017	45	172.326	45	184.635	180	664.686		
		1,01, 02,2 02,4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	49 Satuan Pendidikan	49	7.867.200	49	8.653.920									98	16.521.120	Bidang Pembinaan SMP	
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	45 Satuan Pendidikan					45	9.440.640	45	10.227.360	45	11.014.080	45	11.800.800	180	42.482.880		
		1,01, 02,2 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	100	10.692.033	100	11.525.236	100	12.573.440	100	13.621.643	100	14.669.846	100	15.718.050	100	78.800.248	Bidang PAUD dan DIKMAS	
		1,01, 02,2 03,0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	2 Ruang	2	200.020	2	220.021									4	420.041	Bidang PAUD dan DIKMAS	
				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit					1	240.023	1	260.025	1	280.027	1	300.029	4	1.080.105		
		1,01, 02,2 03,0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	9 Ruang	9	1.122.581	9	1.234.839									18	2.357.420	Bidang PAUD dan DIKMAS	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit					3	1.347.097	3	1.459.355	3	1.571.613	3	1.683.871	12	6.061.937		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1,01, 02,2 03,0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang direhab	10 Ruang	10	1.433.012	10	1.576.313										20	3.009.324	Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit					10	1.719.614	10	1.862.915	10	2.006.216	10	2.149.517	40	7.738.262		
		1,01, 02,2 03,0 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	14 ruang	14	173.354	14	190.689										28	364.044	Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit					7	208.025	7	225.360	7	242.696	7	260.031	28	936.112		
		1,01, 02,2 03,1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Paket bahan/peralatan perlengkapan belajar PAUD	13 Paket	13	260.000	2	50.000										15	310.000	Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket					1	55.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	4	250.000		
		1,01, 02,2 03,1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar PAUD	1 Kegiatn	1	109.315	1	120.247										2	229.562	Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1500 Peserta Didik					1500	131.178	1500	142.110	1500	153.041	1500	163.973	6000	590.301		
		1,01, 02,2 03,1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1 Tahun	1	2.228.550	1	2.451.405										2	4.679.955	Sub Bidang PTK PAUD
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	483 Orang					483	2.674.260	483	2.897.115	483	3.119.970	483	3.342.825	1932	12.034.170		
		1,01, 02,2 03,1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1 Kegiatan	1	143.112	1	157.423										2	300.535	Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan					11	171.734	11	186.046	11	200.357	11	214.668	44	772.805		
		1,01, 02,2 03,1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelolah Dana BOP	296 Satuan Pendidikan	296	5.022.090	295	5.524.299										591	10.546.389	Bidang PAUD dan DIKMAS
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	289 Satuan Pendidikan					289	6.026.508	289	6.528.717	289	7.030.926	289	7.533.135	1156	27.119.286				
1,01, 02,2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100	100	2.234.455	100	2.457.901	100	2.681.346	100	2.904.792	100	3.128.237	100	3.351.683	100	16.758.413	Bidang PAUD dan DIKMAS			
1,01, 02,2 04,0 9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pelaksanaa Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Tahun	1	144.302	1	158.732										2	303.034	Sub Bidang PAUD dan DIKMAS		
			Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket						1	173.162	1	187.593	1	202.023	1	216.453	4	779.231		
		1,01, 02,2 04,1 3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Mutu Siswa/Pendidik pada Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	3	68.320	3	75.152									6	143.472	Sub Bidang PAUD dan DIKMAS	

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	K	Rp (ribu)	Kinerja (K)	Rp (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional				Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	165 Satuan Pendidikan					165	81.984	165	88.816	165	95.648	165	102.480	660	368.928		
		1,01, 02,2 04,1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembayaran Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Tahun	1	1.599.500	1	1.759.450									2	3.358.950	Sub Bidang PAUD dan DIKMAS	
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	112 Orang					112	1.919.400	112	2.079.350	112	2.239.300	112	2.399.250	448	8.637.300		
		1,01, 02,2 04,1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1 Tahun	1	55.033	1	60.536										2	115.569	Sub Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	55 Satuan Pendidikan					55	66.040	55	71.543	55	77.046	55	82.550	220	297.178		
		1,01, 02,2 04,1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	8 Satuan Pendidikan	8	367.300	8	404.030										16	771.330	Sub Bidang PAUD dan DIKMAS
				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan					8	440.760	8	477.490	8	514.220	8	550.950	32	1.983.420		
		1,01, 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memiliki Kualifikasi S1	87,21	87,90	890.852	88,60	979.937	89,30	1.069.022	90,00	1.158.108	90,70	1.247.193	91,40	1.336.278	91,40	6.681.390		
				Persentase guru yang bersertifikat Pendidik	81,06	81,57		82,53		83,49		84,45		85,41		86,37		86,37			
		1,01, 04,2 01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100	100	890.852	100	979.937	100	1.069.022	100	1.158.108	100	1.247.193	100	1.336.278	100	6.681.390		Bidang PTK
1,01, 04,2 01,0 1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Kegiatan	6	890.852	6	979.937											12	1.870.789	Bidang PTK	
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Dokumen					3	1.069.022	3	1.158.108	3	1.247.193	3	1.336.278	12	4.810.601		
				TOTAL			345.071.889		383.525.703		393.242.148		426.092.198		458.942.248		491.792.298		2.498.666.484		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian tahunan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 untuk kinerja bidang Pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Dinas Pendidikan mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan indeks pendidikan dari kondisi kinerja akhir periode RPJMD di tahun 2026 sebesar 74,7 menjadi 74,30 pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD di tahun 2026 indeks pendidikan merupakan indeks komposit yang menyangkut Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks rata-rata Lama Sekolah.

Indeks Kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tahunan dan sasaran RPJMD dalam meningkatkan Indeks Pendidikan adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7 berikut :

Tabel VII
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah/OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD/ Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD/ Renstra 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	6,7 Th	6,71 th	6,72 th	6,73 th	6,74 th	6,75 th	6,76 th	6,76 th
1.2	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33 th	12,50 th	12,67 th	12,84 th	13,01 th	13,18 th	13,18 th
2.1	APS 5-6 Tahun(PAUD)	63,91%	63,91%	65,61%	67,31%	69,01%	70,71%	70,71%	70,71%
2.2	APS 7-15 (SD dan SMP)	90,00%	90,00%	91,02%	92,05%	93,05%	93,06%	93,06%	93,06%
2.3	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%
2.4	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73%	1,73%	1,74%	1,75%	1,76%	1,77%	1,77%	1,77%
2.5	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59%	1,59%	1,70%	1,80%	1,90%	1,92%	1,92%	1,92%
2.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1,65%	1,65%	1,67,1%	1,68%	1,69,1%	170,00%	1,70%	1,70%
2.7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10%	30,10%	33,80%	45,60%	46,80%	47,00%	47,20%	47,20%
2.8	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dan Pengawas dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73%	44,73%	45,09%	45,58%	46,72%	47,28%	48,88%	48,88%
2.9	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	3,01%	3,01%	3,04%	3,08%	3,12%	3,14%	3,14%	3,14%
2.10	Nilai IKM	71,66%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	93,00%	93,00%
2.11	Prediket AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel VII.1
Perubahan dan Penambahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan								
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	6,70 Th	6,71%	6,72%	6,73%	6,74%	6,75%	6,76%	6,76%
1.2	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33%	12,50%	12,67%	12,84%	13,01%	13,18%	13,18%
1.3	APS 5-6 Tahun(PAUD)	63,91%	63,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	APS 7-15 (SD dan SMP)	90,00%	90,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	APS Kesetaraan 7-18 Tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56	61,56
1.7	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18	72,18
1.8	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62	44,62
1.9	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1,65	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74	60,74
1.10	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10%	30,10%	33,80%	62,10%	62,13%	62,16%	62,19%	47,20%
1.11	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73%	44,73%	45,09%	63,00%	64,00%	65,00%	66,00%	66,00%
1.12	Iklim Keamanan SD	-	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69	95,69
1.13	Iklim Keamanan SMP	-	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23	90,23
1.14	Iklim Kebhinekaan SD	-	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73	94,73
1.15	Iklim Kebhinekaan SMP	-	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95	83,95
1.16	Iklim Inklusivitas SD	-	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69	85,69
1.17	Iklim Inklusivitas SMP	-	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66	85,66
1.18	Nilai IKM	71,66%	78,00%	81,00%	84,00%	87,00%	90,00%	93,00%	93,00%
1.18	Prediket AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-226 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Sabak, 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Drs. MUHAMAD EDUARD
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740408 199303 1 002

Lampiran-Lampiran,-

MATRIK

VISI, MISI, TUJUAN/SASARAN RPJMD DAN TUJUAN/SASARAN OPD

Visi	: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)
Misi ke-II	: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
Misi ke-IV	: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis
Tujuan Strategis RPJMD	: 2.2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas
	4.1. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas
Sasaran RPJMD	: 2.2.1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
	4.1.4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
Tujuan OPD	: 1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
	2. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
Sasaran	: 1.1. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
	1.2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
	1.3. Meningkatkan Standar Mutu Pendidikan dan Pelaksanaan Akreditasi
	1.4. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional
	1.5. Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
	2.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Program	: 1. PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
	2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal (Kesetaraan)
	2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Indikator Kinerja Daerah dan OPD serta Proyeksi Capaian Tahun 2021 – 2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2026	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan									
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	6,70 Th	6,71 Th	6,72 Th	6,73 Th	6,74 Th	6,75 Th	6,76 Th	6,76 Th	IK BUPATI
1.2	Harapan lama sekolah	12,16 Th	12,33 Th	12,50 Th	12,67 Th	12,84 Th	13,01 Th	13,18 Th	13,18 Th	
1.3	APS 5-6 Tahun(PAUD)	63,91%	63,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IK KEPALA OPD
1.4	APS 7-15 (SD dan SMP)	90,00%	90,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.5	APS Kesetaraan 7-18 Tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.6	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	1,73	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56	61,56	
1.7	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	1,73	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18	72,18	
1.8	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	1,59	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62	44,62	
1.9	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	1,65	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74	60,74	
1.10	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	30,10%	30,10%	33,80%	62,10%	62,13%	62,16%	62,19%	62,19%	
1.11	Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	44,73%	44,73%	45,09%	63,00%	64,00%	65,00%	66,00%	66,00%	
1.12	Iklim Keamanan SD	-	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69	95,69	
1.13	Iklim Keamanan SMP	-	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23	90,23	
1.14	Iklim Kebhinekaan SD	-	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73	94,73	
1.15	Iklim Kebhinekaan SMP	-	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95	83,95	
1.16	Iklim Inklusivitas SD	-	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69	85,69	
1.17	Iklim Inklusivitas SMP	-	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66	85,66	
1.18	Nilai IKM	71,66	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00	93,00	
1.18	Prediket AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
1.14	Indeks Pelayanan Instansi	82,25	82,30	83,00	83,30	84,00	84,50	85,00	85,00	IK SEKDIS
1.15	Angka melek huruf	99,27%	99,30%	99,33%	99,36%	99,39%	99,42%	99,45%	99,45%	IK PAUD &

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2026	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.16	APK PAUD	77,54%	79,34%	81,18%	82,98%	84,78%	86,58%	88,38%	88,38%	DIKMAS
1.17	APM SD / sederajat	99,18%	99,19%	99,20%	99,21%	99,22%	99,23%	99,24%	99,24%	IK SD DAN SMP
1.18	APM SMP / sederajat	81,87%	81,88%	81,89%	81,90%	81,91%	81,92%	81,93%	81,93%	
1.19	APK SD / sederajat	108,29%	108,32%	108,52%	108,72%	108,92%	109,12%	109,32%	109,32%	
1.20	APK SMP / sederajat	103,10%	103,11%	103,12%	103,13%	103,14%	103,15%	103,16%	103,16%	
1.21	Angka Partisipasi Sekolah SD	97,79%	97,81%	97,83%	97,85%	97,87%	97,89%	97,91%	97,91%	
1.22	Angka Partisipasi Sekolah SMP	91,63%	91,64%	91,65%	91,66%	91,67%	91,68%	91,69%	91,69%	
1.23	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	92,23%	92,24%	92,25%	92,26%	92,27%	92,28%	92,29%	92,29%	
1.24	Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	91,11%	92,11%	93,11%	94,11%	95,11%	96,11%	97%	97%	
1.25	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	83,60%	83,64%	83,68%	83,72%	83,76%	83,80%	83,84%	83,84%	
1.26	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	37,94%	37,95%	37,96%	37,97%	37,98%	37,99%	38,00%	38,00%	
1.27	Rasio guru/murid SD sederajat	54,04%	54,09%	54,14%	54,19%	54,24%	54,29%	54,34%	54,34%	IK SD DAN SMP
1.28	Rasio guru/murid SMP sederajat	67,25%	67,27%	67,29%	67,31%	67,33%	67,35%	67,37%	67,37%	
1.29	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	7,78%	7,70%	7,68%	7,64%	7,62%	7,60%	7,58%	7,58%	
1.30	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	10,65%	10,63%	10,61%	10,59%	10,57%	10,55%	10,53%	10,53%	
1.31	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,73%	99,62%	99,64%	99,67%	99,69%	99,73%	99,80%	99,80%	
1.32	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.33	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,45%	97,46%	97,47%	97,48%	97,49%	97,50%	97,51%	97,51%	
1.34	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.35	Pesentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	50%	50%	52,79%	55,33%	57,87%	60,41%	60,41%	60,41%	
1.36	Pesentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	57,78%	57,78%	59,18	67,35%	75,51%	83,67%	83,67%	83,67%	
1.37	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SD-SMP)	78,60%	78,85%	79,19%	79,36%	79,61%	79,86%	80,11%	80,11%	IK PTK
1.38	Persentase Guru yang bersertifikat pendidik	81,06%	81,57%	82,53%	83,49%	84,45%	85,41%	86,37%	86,37%	
1.39	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,21%	87,90%	88,60%	89,30%	90,00%	90,70%	91,40%	91,40%	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 502 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021 – 2026INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah Harapan Lama Sekolah		Angka BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76
				Angka BPS	Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{t=a}^n \frac{E_t^t}{P_t^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a tahun t E_t^t : Jumlah penduduk usia t yang bersekolah pada tahun t P_t^t : Jumlah penduduk usia t pada tahun t t : Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi pesantren	Tahun	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18
1.1			Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	1. APS PAUD 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	63,91	100	100	100	100	100
				2. APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 7-15 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	90,00	100	100	100	100	100
				3. APS Kesetaraan 7-18 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan dengan Populasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berdasarkan proyeksi (BPS)	%	-	100,00	100	100	100	100
1.2			Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	4. Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56
				5. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18
				6. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
				7. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74
1.3			Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	jumlah lembaga yang berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	%	30,10	33,80	62,10	62,13	62,16	62,19
1.4			Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	9. Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yang memiliki ijazah S1/D4,S2,dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	%	44,73	45,09	63,00	64,00	65,00	66,00
1.5			Terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	10. Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.	Nilai	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69
				11. Iklim Keamanan SMP		Nilai	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23
				12. Iklim Kebhinekaan SD	Iklim kebhinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Nilai	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73
				13. Iklim Kebhinekaan SMP		Nilai	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95
				14. Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69
				15. Iklim Inklusivitas SMP		Nilai	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik		Angka Menpan RB	Penilaian Menpan RB	Nilai	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	16. Nilai IKM	hasil survey	Nilai	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00
				17. Prediket Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilai inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Keterangan :

Kepala Daerah

Kepala Dinas (Penambahan Indikator mulai Tahun 2023)

Kepala Dinas (Perubahan Target Tahunan mulai Tahun 2023)



Kepala Dinas,

Drs. MUHAMAD EDUAR
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 19740408 199303 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 178 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Februari 2024

TENTANG : PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah		Angka BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76
		Harapan Lama Sekolah		Angka BPS	Formula → $HLS_{it}^e = FK \times \sum_{j=1}^n \frac{E_{ij}^t}{P_{ij}^t}$ Keterangan: HLS_{it}^e : Harapan Lama Sekolah pada tahun ke-t E_{ij}^t : Jumlah penduduk usia / pernah bersekolah pada tahun t P_{ij}^t : Jumlah penduduk usia / pada tahun t FK : Faktor konversi (konstanta)	Tahun	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18
1.1			Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	1. APS PAUD 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	63,91	100	100	100	100	100
				2. APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 7 -15 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	90,00	100	100	100	100	100
				3. APS Kesetaraan 7 - 18 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan dengan Populasi penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berdasarkan proyeksi (BPS)	%	-	100	100	100	100	100
1.2			Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	4. Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56
				5. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18
				6. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62
				7. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.3			Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	jumlah lembaga yang berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	%	30,10	33,80	62,10	62,13	62,16	62,19
1.4			Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	9. Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yang memiliki ijazah S1/D4,S2,dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	%	44,73	45,09	63,00	64,00	65,00	66,00
1.5			Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	10. Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.	Nilai	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69
				11. Iklim Keamanan SMP		Nilai	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23
				12. Iklim Kebhinekaan SD	Iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Nilai	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73
				13. Iklim Kebhinekaan SMP		Nilai	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95
				14. Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69
				15. Iklim Inklusivitas SMP		Nilai	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik		Angka Menpan RB	Penilaian Menpan RB	Nilai	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
2.1			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	16. Nilai IKM	hasil survey	Nilai	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00
				17. Prediket Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Keterangan : Kepala Daerah
Kepala Dinas

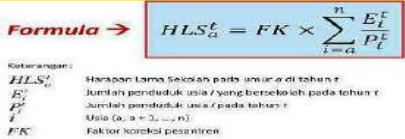


Kepala Dinas,

Drs. MUHAMAD EDUAR
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 19740408 199303 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2025
 TANGGAL : 02 Januari 2025
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA SASARAN STRATEGIS
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 TIMUR TAHUN 2021 – 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76
		Harapan Lama Sekolah		Angka BPS		Tahun	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18
1.1			Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	1. APS PAUD 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	63,91	100	100	100	100	100
				2. APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 7 -15 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	90,00	100	100	100	100	100
				3. APS Kesetaraan 7 - 18 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan dengan Populasi penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berdasarkan proyeksi (BPS)	%	-	100	100	100	100	100
1.2			Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	4. Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56
				5. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
				6. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62
				7. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74
1.3			Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	jumlah lembaga yang berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	%	30,10	33,80	62,10	62,13	62,16	62,19
1.4			Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	9. Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yang memiliki ijazah S1/D4,S2,dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	%	44,73	45,09	63,00	64,00	65,00	66,00
1.5			Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	10. Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.	Nilai	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69
				11. Iklim Keamanan SMP		Nilai	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23
				12. Iklim Kebhinekaan SD	Iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Nilai	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73
				13. Iklim Kebhinekaan SMP		Nilai	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95
				14. Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69
				15. Iklim Inklusivitas SMP		Nilai	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Angka Menpan RB	Penilaian Menpan RB	Nilai	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8
2.1			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	16. Nilai IKM	hasil survey	Nilai	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00
				17. Prediket Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB